

IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF (STUDI EVALUATIF METODE CIPP DI SMA NEGERI 2 METRO)

Oleh

Nofita Sari Astanu, Sowiyah, Irawan Suntoro

FKIP Unila: Jl. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung

E-Mail: nofe.mp3@gmail.com

HP: 081224701188

Abstract: Implementation of Inclusive Education Program. This study aimed to analyze, describe and evaluate of Inclusive Education Program Implementation in SMAN 2 Metro. This study used qualitative approach. Techniques of collecting data were interviewing, observations and documentations. Analysis data techniques used data interactive type of Miles and Hubberman's theories. The results of study were (1). Contact; implementation of Inclusive Education Program referred Metro Mayor's rules related to Implementation of Inclusive Education Program. (2). Input; a. Students were able to do behavior modification, b. mastered of concept and learning activity process for blind, deaf, intellectual disorder, parts of body and movement disorder, behavior and social disorder. (3). Process; Implementation of Inclusive Education Program could not be separated with modification curriculum as a support for this program. It can be concluded that process of supplying infrastructures were run well but the process of this implementation did not run well yet.

Keywords: CIPP model, evaluative study, implementation, inclusive education program

Penelitian ini bertujuan menganalisis, mendeskripsikan dan mengevaluasi pengimplementasian program pendidikan inklusif di SMAN 2 Metro. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik mengumpulkan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan pola interaktif data Miles dan Hubberman. Hasil penelitian diperoleh adalah (1). *Contact*: Pelaksanaan pendidikan inklusi di SMAN 2 Metro mengacu pada peraturan Walikota Metro tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi. (2). *Input*: a. Anak mampu melakukan modifikasi perilaku, b. menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan penglihatan, pendengaran, intelektual, anggota tubuh dan gerak, perilaku dan sosial. (3) *Process*: Proses penyelenggaraan program pendidikan inklusi tidak terlepas dari kurikulum yang dikembangkannya sebagai pendukung terlaksananya pendidikan inklusi. Bisa disimpulkan bahwa proses pengadaan sarana dan prasarana berjalan dengan lancar akan tetapi proses penyelenggaraan belum berjalan dengan maksimal.

Kata kunci: implementasi, model CIPP, program pendidikan inklusif, studi evaluatif

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam lini kehidupan. Semua orang membutuhkan pendidikan untuk memberikan gambaran dan bimbingan dalam melakukan segala aktifitas di berbagai bidang. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 31, yang menyatakan "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Hal ini menegaskan bahwa setiap orang atau individu berhak untuk mendapatkan pendidikan, tanpa terkecuali anak berkebutuhan khusus sekalipun.

Anak berkebutuhan khusus menurut Heward adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka.

Selama ini, pendidikan bagi anak berkelainan disediakan dalam tiga macam

lembaga pendidikan, yaitu Sekolah Berkelainan (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Pendidikan Terpadu. SLB, sebagai lembaga pendidikan khusus tertua, menampung anak dengan jenis kelainan yang sama, sehingga ada SLB Tunanetra, SLB Tunarungu, SLB Tunagrahita, SLB Tunadaksa, SLB Tunalaras dan SLB Tunaganda. Sedangkan SDLB menampung berbagai jenis anak berkelainan, sehingga di dalamnya mungkin terdapat anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras dan tunaganda. Sedangkan pendidikan terpadu adalah sekolah biasa yang juga menampung anak berkelainan, dengan kurikulum, guru, sarana pengajaran dan kegiatan pembelajaran yang sama. Namun selama ini baru menampung anak tunanetra, itupun perkembangannya kurang menggembirakan karena banyak sekolah umum yang keberatan menerima anak berkelainan.

Pada umumnya, lokasi SLB,SDLB dan Sekolah Terpadu berada di Ibu Kota Kabupaten. Padahal anak-anak berkelainan tersebar hampir di seluruh daerah (Kecamatan/desa), tidak hanya di Ibu Kota Kabupaten. Akibatnya, sebagian anak-anak berkelainan, terutama yang kemampuan ekonomi orang tuanya lemah, terpaksa tidak disekolahkan karena lokasi SLB,SDLB dan Sekolah Terpadu tersebut jauh dari rumah dan biayanya pun relatif mahal. Sedangkan kalau akan disekolahkan di sekolah terdekat, sekolah tersebut tidak bersedia menerima karena merasa tidak mampu melayaninya. Sebagian sekolah yang lain, mungkin selama ini dapat diterima di sekolah terdekat, namun karena ketiadaan pelayanan khusus bagi mereka, akibatnya mereka beresiko tinggal kelas dan akhirnya putus sekolah. Untuk mengantisipasi hal diatas, dipandang perlu meningkatkan perhatian terhadap anak-anak berkelainan.

Seperti diatur oleh pasal 5 ayat (2) dan (4) pasal 32 Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional, bahwa “warga negara yang memiliki kelainan fisik,emosional, mental, intelektual dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”. Menurut penjelasan undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan pendidikan khusus adalah penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang

memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut selanjutnya dielaborasi oleh pasal 41 ayat (1) peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan, yaitu bahwa “setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus”. Se jauh ini tidak semua satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif memiliki pendidik yang memiliki kompetensi pendidikan khusus yang sesuai dengan karakteristik anak berkebutuhan khusus.

Namun demikian sampai sejauh ini penyelenggaraan pendidikan inklusif di negeri ini belum sesuai dengan harapan. Secara faktual sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif secara nasional masih sangat sedikit. Padahal jumlah anak berkebutuhan khusus sangat besar. Menurut WHO jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia adalah sekitar 7% dari total jumlah anak usia 0-18 tahun atau sebesar 6.230.000 pada tahun 2007. Menurut data Sensus Nasional Biro Pusat Statistik tahun 2003 jumlah penyandang cacat di Indonesia sebesar 0,7% dari jumlah penduduk sebesar 211.428.572 atau sebanyak 1.480.000 jiwa. Dari jumlah tersebut 24,45% atau 361.860 diantaranya adalah anak-anak usia 0-18 tahun dan 21,42% atau 317.016 anak merupakan anak cacat usia sekolah (5-18 tahun). Sekitar 66.610 anak usia sekolah penyandang cacat (14,4% dari seluruh anak penyandang cacat) ini terdaftar di Sekolah Luar Biasa (SLB). Ini berarti masih ada 295.250 anak penyandang cacat (85, 6%) ada di masyarakat dibawah pembinaan dan pengawasan orang tua dan keluarga dan pada umumnya belum memperoleh akses pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya. Pada tahun 2009 jumlah anak penyandang cacat yang ada di Sekolah meningkat menjadi 85.645 dengan rincian di SLB sebanyak 70.501 anak dan di sekolah inklusif sebanyak 15.144 anak.²

Menurut Direktorat pembinaan SLB (2007), hal ini disebabkan oleh tiga hal, yaitu (1) kondisi ekonomi orang tua yang kurang

menunjang, (2) jarak antara rumah dan Sekolah Luar Biasa (SLB) cukup jauh, dan (3) sekolah umum (SD,SMP,SMA) tidak mau menerima anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan anak-anak normal. Oleh karena itu perlu diupayakan model layanan pendidikan yang memungkinkan anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan anak normal di sekolah umum.

Bisa diketahui bahwa masih banyaknya peserta didik berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Kondisi seperti ini disebabkan adanya berbagai hambatan termasuk di dalamnya kondisi sosial budaya masyarakat. Hambatan paling besar dalam pengembangan pendidikan inklusif ini adalah kondisi sosial dan masyarakat. Hambatan lainnya datang dari sekolah, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif belum dapat menyelenggarakan pendidikan inklusif secara optimal. Sehingga penyelenggaraan pendidikan inklusif ini sampai sekarang belum berkembang baik. Padahal menurut Foreman (2002) sekolah inklusif harus menyediakan semua kebutuhan siswa, apapun tingkat kebutuhan dan keadaan siswa tersebut.

Sebagian besar masyarakat merasa malu mempunyai anak cacat, sehingga mereka berupaya menyembunyikan anaknya. Dengan demikian anak tersebut tidak dapat menerima pendidikan sebagaimana mestinya. Akibatnya, anak-anak tersebut tidak mendapatkan layanan pendidikan seperti anak-anak lainnya. Padahal mereka memiliki hak yang sama seperti anak-anak lainnya. Di lain pihak banyak orang tua yang tidak sadar bahwa anaknya yang mempunyai kekhususan yang juga memiliki hak yang sama dengan anak lainnya. Karena itu, Pemerintah meminta kesadaran orang tua untuk memberi akses kepada mereka. Hambatan lainnya berasal dari masyarakat atau anak-anak di sekolah umum yang belum dapat menerima kehadiran anak-anak cacat di tengah mereka. Hal – hal seperti inilah yang mengakibatkan pendidikan inklusif di Indonesia kurang berkembang. Oleh karena itu dipandang perlu untuk meningkatkan perhatian terhadap anak-anak berkelainan, baik yang telah memasuki sekolah umum tetapi belum mendapatkan pelayanan pendidikan khusus maupun anak-anak berkelainan yang belum sempat

mengenyam pendidikan sama sekali karena tidak diterima di sekolah umum terdekat atau karena lokasi SLB jauh dari tempat domisilinya.

Berdasarkan data Direktorat Pembinaan PK-LK Dikdas tahun 2010 angka partisipasi murni ABK untuk jenjang pendidikan dasar baru mencapai 30% (106.000 anak). Hingga pada tahun 2008, jumlah sekolah inklusif secara nasional dari SD hingga SMA hanya 254 sekolah. Meskipun kegiatan sosialisasi, pemberian bantuan operasional, dan pelatihan telah banyak dilakukan, tingkat penerimaan sekolah reguler untuk menerima ABK masih sangat rendah.

Sejauh ini penetapan sekolah inklusif dilakukan melalui dua cara, yaitu pertama: sekolah yang akan menerima anak berkebutuhan khusus mengajukan proposal penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Dan kedua: sekolah yang telah memiliki peserta didik berkebutuhan khusus melaporkan penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada Dinas pendidikan Kabupaten/kota. Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan hasil monitoring dan evaluasi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menetapkan sekolah yang bersangkutan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif dengan menerbitkan surat penetapannya.

Pendidik atau guru yang bertugas di sekolah inklusif juga mestinya berbeda dengan guru yang bertugas di sekolah reguler. Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat pembinaan SLB, pendidik di sekolah inklusif terdiri atas guru kelas, guru mata pelajaran tertentu (pendidikan Agama, Pendidikan jasmani dan Kesehatan. Serta pendidikan Kesenian) dan Guru Pendidikan Khusus (GPK). GPK bertugas sebagai pendamping guru kelas dan guru mata pelajaran dalam melayani anak berkebutuhan khusus agar potensi yang dimiliki berkembang secara optimal.

Pembelajaran di kelas inklusif menjadi masalah ketika guru harus mengajar di kelas tanpa didampingi GPK. Guru harus menangani semua siswa di kelas termasuk siswa ABK. Di lain pihak kompetensi guru-guru di sekolah tersebut tidak dipersiapkan untuk dapat mengajar dikelas yang memiliki ABK. Berbagai permasalahan lain muncul di sekolah-sekolah inklusif, mulai dari

penyiapan pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, proses pembelajaran di kelas, serta pembiayaannya.

Terkait program penyelenggaraan pendidikan inklusif ini, Penulis memilih Kota Metro sebagai salah satu kota di Provinsi Lampung sebagai kota pendidikan yang istimewa untuk pengimplementasian pendidikan inklusi dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah (Pertama dan Atas). Sehubungan dengan objek penelitian yang dipilih peneliti yaitu tingkat Sekolah Menengah Atas, maka peneliti memilih SMAN 2 Metro sebagai objek penelitiannya. Pemerintah Kota Metro menunjuk SMAN 2 Metro menjadi salah satu SMAN yang menyelenggarakan pendidikan inklusi sejak tahun 2010. Di sekolah tersebut pada saat ini terdapat 26 siswa/siswi berkebutuhan khusus yang tersebar dari kelas satu (1) sampai kelas tiga (3) pada tahun ajaran 2012-2013. Anak Berkebutuhan Khusus yang ada di SMAN 2 Metro ini tergolong anak yang kesulitan belajar, tunadaksa, tuna wicara dan lamban belajar (*slow learner*).

Menurut Kepala Bappeda Haidarmansyah, Metro menyiapkan 18 sekolah untuk menampung anak berkebutuhan khusus. Karena itu, ia meminta para orang tua segera memasukkan anaknya. Data Bappeda menyebutkan dari 317 anak berkebutuhan khusus di Metro, baru 236 anak yang bersekolah.

Terkait pengoptimalan peran dan fungsi sekolah inklusif sehingga dapat memberikan layanan yang optimal, khususnya pelayanan pada penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pada penelitian ini penulis akan mengevaluasi pengimplementasian program pendidikan inklusif yang telah berjalan di SMAN 2 Metro ini. Sejauh ini apakah sudah berjalan sebagaimana program yang telah digulirkan oleh pemerintah. Berdasarkan pedoman khusus penyelenggaraan pendidikan inklusif. Perlu diketahui bahwa sekolah ini belum pernah melakukan evaluasi sebelumnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sisdiknas, Pasal 1 butir 21; menyatakan bahwa Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 2 Metro Lampung, dimana pada sekolah ini mengimplementasikan program pendidikan inklusi. Penelitian ini berlangsung dari bulan Juli 2013 sampai dengan bulan September 2013. Dipilihnya SMAN 2 Metro Lampung sebagai tempat penelitian dikarenakan SMA ini merupakan salah satu SMA yang mengimplementasikan program pendidikan inklusif yang telah berjalan sejak tahun 2010, sehingga peneliti merasa tertarik untuk meneliti terkait Konteks, Input, Proses dan Produk Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang telah dilakukan oleh SMAN 2 Metro ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluatif dengan menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam. Model ini dikembangkan oleh Stufflebeam. Penelitian evaluatif model CIPP ini, menilai dari keempat komponen tersebut. Harapannya agar dapat digunakan sebagai masukan dalam penyelenggaraan program pendidikan inklusif di SMAN 2 Kota Metro. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Kelebihan model CIPP ini terletak pada komponen *context* (konteks), *input* (masukan), *process* (proses) dan *product* (hasil). Terlaksananya keempat komponen tersebut sangat diharapkan dalam proses evaluasi ini.

Berdasarkan uraian tersebut, model CIPP Stufflebeam ini sangat sesuai untuk mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan inklusif di SMAN 2 Kota Metro. Pelaksanaan evaluasi ini lebih menyeluruh apabila dilihat dari keempat komponen tersebut, sehingga kesimpulan yang akan dihasilkan akan lebih menyeluruh terhadap program tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teori fenomenologi. Fenomenologi pada dasarnya berpandangan bahwa apa yang tampak di permukaan, termasuk pola perilaku sehari-hari hanyalah suatu gejala atau fenomena dari apa yang tersembunyi di "kepala" sang pelaku. Perilaku apa pun yang tampak di tingkat permukaan baru bisa dipahami atau dijelaskan manakala bisa mengungkap atau membongkar apa yang tersembunyi dalam dunia kesabaran atau dunia pengetahuan si manusia pelaku (Burhan Bungin, 2008:9). Dalam pandangan fenomenologis peneliti berusaha untuk

memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang yang biasa dalam situasi tertentu (Moleong, 2013:17).

Ciri-ciri penelitian kualitatif adalah: (1) mempunyai latar belakang alami, (2) peneliti merupakan instrumen utama dalam usaha pengumpulan data, (3) Metode kualitatif, (4) analisis data secara induktif, (5) bersifat deskriptif, (6) lebih mementingkan proses dari pada hasil, (7) ada batas yang ditentukan oleh fokus, (8) menggunakan teori dasar, (9) ada kriteria khusus untuk keabsahan data, (10) desain bersifat sementara, dan (11) hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama (Moleong, 2013:8).

Penelitian ini diperlukan pengamatan secara mendalam dan menyeluruh, dan data yang diungkap bukan berupa angka-angka tetapi berupa kata-kata dan dokumen. Penggunaan teori fenomenologis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dapat mengungkap fenomena dan peneliti akan berupaya menemukan peristiwa-peristiwa yang dapat dipahami peneliti dan berbagai pendapat dan isu yang ada, dan fenomena-fenomena yang nampak pada obyek penelitian ini yaitu untuk menggali masalah-masalah pada pengimplementasian manajemen pendidikan inklusi.

Rancangan penelitian dalam penelitian ini menggunakan Metode Evaluatif, Metode Evaluatif dipilih dengan tujuan memperoleh informasi manajemen pendidikan inklusi di SMAN 2 Metro secara rinci dan menyeluruh dari fokus penelitian pada latar secara alamiah dan memiliki karakteristik yang berkaitan dengan pertanyaan yang beragam, serta untuk menemukan variabel yang ada dalam konteks nyata yang berkaitan dengan pertanyaan bagaimana dan mengapa (Bogdan dan Biken, 1998).

Moleong (2013), Sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan tehnik *sampling purposive*, agar data yang diperoleh dari informan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Pengambilan sampel bukan dimaksudkan untuk mewakili populasi, melainkan didasarkan pada relevansi dan

kedalaman informasi serta didasarkan pada tema yang muncul di lapangan.

Dalam metode penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu; 1), Wawancara, 2), Observasi, 3), Dokumentasi, dan 4), Diskusi terfokus (*Focus Group Discussion*).

Proses analisis data dilakukan secara siklus dan bolak-balik (*interactive*) selama dan setelah proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data, analisis dan pemaparan data serta penarikan kesimpulan secara interaktif dipilih berdasarkan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992).

Pengecekan keabsahan data penelitian menurut Moleong (2013) dapat dilakukan melalui empat cara pengecekan data, yaitu melalui: 1. Derajat kepercayaan, 2. Keteralihan, 3. Ketergantungan, 4. Kepastian data peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil interview, observasi, dan dokumentasi, maka hasil penelitian terkait dengan komponen konteks, input, proses, dan produk yang telah dilakukan, peneliti selanjutnya akan mengungkapkan hasil berdasarkan fokus penelitian sebagai berikut:

Komponen Konteks

Kesesuaian kebutuhan proses penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMAN 2 Metro sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro : Nomor:213/KPPS/D.3/2011 Tentang Penetapan SD/SMP/SMA Pelaksana Sekolah Inklusif. SMA Negeri 2 Metro menjadi salah satu SMA yang terpilih untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif ini.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMAN 2 Metro telah sesuai dengan Keputusan Walikota Metro, nomor: 416/D3/KPTS/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja)

penyelenggaraan pendidikan inklusif dan akselerasi kota metro masa bhakti 2012 – 2016.

Peraturan Walikota Metro, nomor 03 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Belum maksimal kebutuhan proses penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Tujuan diselenggarakannya pendidikan inklusif ini untuk menyamaratakan Anak Berkebutuhan Khusus dengan Anak Normal bahwa diantara mereka tidak ada kesenjangan. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memperoleh pendidikan.

Pelaksanaan pendidikan inklusif di SMAN 2 Metro sudah dibatasi 2 jenis kekhususan dan jumlahnya tidak lebih dari 5 peserta didik setiap kelasnya. Hal ini dilakukan mengingat belum memadainya fasilitas pendukung apabila jumlah peserta didiknya lebih banyak.

Sarana dan Prasarana yang disediakan pada tahun 2010 itu berupa kursi roda dan kayu penyanggah sebagai alat bantu berjalan dikarenakan ada siswa ABK yang masuk kategori Tunadaksa. Untuk tahun selanjutnya dana didistribusikan untuk pengembangan sekolah yang berupa IT, buku – buku referensi, alat praktek, laboratorium, alat kesenian dan olahraga untuk memenuhi rasa ingin tahu dan minat Anak Berkebutuhan Khusus.

Manajemen pembiayaan Anak Berkebutuhan Khusus mendapatkan kewajiban yang sama untuk, membayar SPP kecuali anak yang kurang mampu akan mendapatkan beasiswa pendidikan yang disediakan oleh pihak sekolah. Pada tahap perintisan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan bantuan dana. Selanjutnya Pemerintah Pusat masih memberikan bantuan serta Sekolah mencoba belajar mandiri untuk mengajukan pendanaan – pendanaan ke berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta. Sejauh ini dana khusus dari Pemerintah telah dialokasikan untuk keperluan: kegiatan identifikasi dan

asesmen peserta didik berkebutuhan khusus, modifikasi kurikulum, insentif bagi tenaga kependidikan yang terlibat, pengadaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan kegiatan. Akan tetapi sangat disayangkan masih belum adanya komitmen dari orang tua peserta didik, masyarakat (Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah) bahkan pemerintah daerah dalam membantu perihal pendanaan yang dibutuhkan oleh Anak Berkebutuhan Khusus tersebut.

Manajemen lingkungan (Hubungan Sekolah dengan Masyarakat), masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membantu mengembangkan pendidikan inklusif. Untuk hal ini pihak sekolah harus lebih intens lagi untuk merangkul masyarakat terutama dilingkungan sekitar agar muncul rasa saling memiliki dan bertanggung jawab.

Komponen Input

Kesesuaian Siswa, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMAN 2 Metro terlihatnya belum ada Guru Pembimbing Khusus yang memiliki SK dari Pemerintah untuk mendampingi Anak Berkebutuhan Khusus. Sementara ini yang menjadi Guru Pembimbing Khusus berasal dari internal yaitu Guru BK dan Bidang Studi.

Guru Pendamping Khusus yang berasal dari internal, mereka baru sekali mengikuti Workshop mengenai pendidikan inklusif. Maka dari itu mereka harus selalu di follow up dengan cara mengikuti Workshop yang berhubungan dengan inklusif sehingga pemahaman mereka bisa lebih dalam untuk menangani Anak Berkebutuhan Khusus tersebut.

Perencanaan pembelajaran masih menggunakan kurikulum yang sesuai dengan sekolah, akan tetapi khusus anak berkebutuhan khusus mereka diturunkan nilai passing gradenya sebagai perencanaan pembelajaran (*khusus*) Sejauh ini pengelolaan pembelajaran dikelas sama dengan yang lainnya, akan

tetapi ada kekhususan jika ABK tersebut tidak lulus ujian, maka akan ada remedial atau ujian yang membantu nilai mereka meningkat sampai mereka bisa mendapatkan passing grade / KKM yang telah disesuaikan dengan kapasitas mereka.

Komponen Proses

Kesesuaian proses pembelajaran Metode pembelajaran audio dan visual dimana metode yang dipakai sama dengan siswa umum lainnya. Modifikasi kurikulum telah dilakukan oleh pihak sekolah, dimana KKM diturunkan untuk disesuaikan dengan kondisi murid di SMAN 2 Metro.

Proses perumusan kurikulum itu dilakukan oleh Guru BK dan Guru Reguler yang telah dipilih untuk menangani Anak Berkebutuhan Khusus di sekolah tersebut. Guru – guru yang telah terpilih itu telah mengikuti Workshop tentang tidak ada perbedaan antara desain kurikulum sekolah reguler dengan sekolah inklusi, yang berbeda hanya pengimplementasian pada Anak Berkebutuhan Khusus, dimana KKM nya yang diturunkan dan Kurikulum nya dikombinasikan.

Guru senantiasa melakukan evaluasi kurikulum yang sedang berjalan agar materi yang dikembangkan dan diterapkan selalu sesuai dengan perkembangan. Proses pembelajaran telah sesuai dengan pedoman khusus penyelenggaraan pendidikan inklusif, dimana proses jadwal, pengaturan materi, alokasi waktu, pembagian antara pelajaran, ekstrakurikuler serta pengayaan.

Manajemen lingkungan sekolah (hubungan sekolah dengan masyarakat) belum sesuai dengan pedoman khusus penyelenggaraan inklusif dimana masyarakat masih kurang peduli dan peka terhadap program pendidikan inklusif ini. Maka dari itu menjadi tugas

sekolah untuk mensosialisasikan lagi pentingnya program inklusif ini.

Pembinaan dan pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan sudah mulai berproses baik dimana sudah adanya seminar yang berhubungan dengan pendidikan inklusif dengan tujuan untuk memberi pemahaman yang lebih mendalam lagi tentang pendidikan inklusif ini terhadap guru.

Tugas pokok pendidik yang mengajar kelas inklusif yaitu membimbing dan mengarahkan. Jenis bimbingan materi pelajaran dan memberikan standar KKM yang sesuai dengan kemampuan mereka. Sekolah menjalin kerjasama hanya dengan pihak SLB saja. Sedangkan untuk tenaga dokter / psikolog belum ada jalinan kerjasama.

Sumber pembiayaan berasal dari pusat. Ada monitoring dari pusat sejak tahun 2010. Seluruh siswa membayar SPP dengan jumlah yang sama baik itu murid umum maupun khusus. Laporan pertanggung jawaban dilaporkan ke pemerintah pusat dan kepala sekolah

Kompetensi belajar yg dicapai oleh ABK mengalami peningkatan. Semua mereka lulus ujian dan ada yang diterima di Universitas Negeri Jakarta dan Akademi Keperawatan.

Komponen Produk

Kesesuaian pelayanan, peran masyarakat dan Orang tua terhadap produk yang dicapai dalam program pendidikan inklusif di SMAN 2 Metro dapat dilihat dalam hal pengelolaan manajemen pelayanan khusus yang telah berjalan sesuai dengan pedoman khusus penyelenggaraan pendidikan inklusif akan tetapi belum maksimal.

Proses pengadaan sarana dan prasarana berjalan dengan lancar. Sejauh ini pusat yang memberikan sarana dan prasarana untuk kepentingan sekolah, khususnya ABK. Ketersediaan sarana dan prasarana bisa dikatakan sudah memadai. Masih terlihat kurangnya peran

masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif ini. kurangnya kepekaan masyarakat untuk bersumbangsih atau berperan serta.

Sekolah bekerjasama dengan SLB yang berada dekat dengan sekolah tersebut, bekerjasama dengan pemerintah daerah serta pemerintah pusat. Peran orang tua ABK ada yang terlihat peka terhadap anaknya dengan terus menerus memantau perkembangan anaknya, ada yang terlihat acuh tak acuh terhadap perkembangan anaknya di sekolah. Temuan penelitian yang akan disajikan di bawah ini berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian implementasi program pendidikan inklusif (Studi evaluatif di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Metro.

Pembahasan Hasil Penelitian

Bagian ini membahas hasil penelitian implementasi program pendidikan inklusif pada SMAN 2 Metro yang pemaparannya disesuaikan dengan fokus penelitian, meliputi: 1) komponen konteks, 2) komponen input, 3) komponen proses, 4) komonen produk.

Komponen Konteks

Hasil penelitian ini dimulai dari kegiatan penyelenggaraan program pendidikan inklusif yang dilakukan oleh SMAN 2 Metro. Konsep pendidikan inklusif diterapkan menjadi sebuah formula untuk menegakkan hak asasi manusia dalam konteks pendidikan. Kauffman & Hallahan, 2005; Sailor & Roger, 2005 (dalam John W Santrock, 2009: 46) Anak-anak yang memiliki keterbatasan dapat ditempatkan diberbagai tempat, dan beragam pelayanan dapat digunakan untuk meningkatkan pendidikan mereka. Pendidikan inklusif keberadaannya memiliki landasan, baik landasan filosofis, landasan religius, landasan yuridis, landasan pedagogis, landasan empiris.

Landasan yuridis dalam pelaksanaan pendidikan inklusif berkaitan langsung dengan hierarki, undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan direktur jenderal, hingga peraturan sekolah. Pada landasan yuridis internasional pendidikan inklusif adalah Deklarasi Salamanca (UNESCO, 1994), deklarasi ini merupakan sebuah penegasan kembali atas Deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan berbagai deklarasi lanjutan yang berujung pada Peraturan Standar PBB tahun 1993 tentang kesempatan yang sama bagi individu yang mengalami gangguan untuk memperoleh pendidikan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan yang ada. Sementara di Indonesia, penerapan pendidikan inklusif dijamin oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik berkelainan atau memiliki kecerdasan luar biasa diselenggarakan secara inklusif atau berupa sekolah khusus. Dengan melihat landasan yuridis tersebut, sekolah regular tidak mempunyai kewenangan untuk menolak anak berkebutuhan khusus (ABK).

Landasan Pedagogis dalam pelaksanaan pendidikan inklusif terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dengan jaminan Undang-Undang ini, pelaksanaan pendidikan inklusif bagi anak nerkebutuhan khusus (ABK) akan semakin berkembang.

Landasan Empiris, penelitian tentang inklusif telah banyak dilakukan di negara-negara Barat sejak 1980-an, namun penelitian yang berskala besar dipelopori oleh *The National Academy Of*

Sciences (Amerika Serikat). Hasilnya menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas, atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif. Beberapa pakar bahkan mengemukakan bahwa sangat sulit untuk melakukan identifikasi dan penempatan anak berkelainan secara tepat karena karakteristik mereka yang sangat heterogen.

Beberapa peneliti kemudian melakukan metaanalisis (analisis lanjut) atas hasil banyak peneliti sejenis. Hasil analisis oleh Calberg dan Kavale (1980) terhadap 50 tindakan peneliti Wang dan Baker (1985/ 1986) terhadap 11 tindakan penelitian, dan Baker (1994) terhadap 13 tindakan penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusif berdampak positif, baik terhadap perkembangan akademik maupun sosial anak berkelainan dan teman sebayanya (dalam John W Santrock, 2009 : 203).

Menimbang dari landasan yuridis diatas, sehingga terbentuk sebuah konsep pendidikan inklusif yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Inklusif merupakan sebuah istilah yang memiliki ukuran universal. Inklusif memiliki arti persamaan, keadilan, dan hak individual dalam berbagai aspek kehidupan. Prinsip dalam inklusif mempunyai peranan penting untuk menyelaraskan kehidupan sesama manusia, lebih lagi manusia adalah makhluk yang dikenal membutuhkan sesama yang berarti makhluk sosial. Dalam sudut pandang pendidikan, inklusif dapat diartikan sebuah model pendidikan yang tidak membeda-bedakan individu berdasarkan kemampuan atau kelainan yang dimiliki individu.

Hal itulah yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Penulis ingin mengetahui bagaimanakah konsep pendidikan inklusif yang tertuang dalam Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro : Nomor : 213/KPPS/D.3/2011 Tentang Penetapan SD/SMP/SMA

Pelaksana Sekolah Inklusif. SMA Negeri 2 Metro menjadi salah satu SMA yang terpilih untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif ini.

Sesuai dengan Keputusan Walikota Metro, nomor : 416/D3/KPTS/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) penyelenggaraan pendidikan inklusif dan akselerasi kota metro masa bhakti 2012 – 2016. Serta Peraturan Walikota Metro, nomor 03 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Dari wawancara di simpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif di SMAN 2 Metro mengacu pada peraturan walikota Metro dan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Penyelenggaraan pendidikan inklusif belum berjalan dengan maksimal.

Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan dalam merencanakan dan penyelenggaraan program pendidikan inklusi di SMAN 2 Metro adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Kebutuhan Anak
Seluruh anggota tim perlu memahami secara tepat apa yang menjadi kebutuhan anak. Orang tua diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai keberadaan anak mereka. Informasi yang tepat akan sangat membantu terhadap ketepatan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
2. Identifikasi Sumber-Sumber Pendukung
Setelah kebutuhan anak telah teridentifikasi kemudian tim membuat daftar semua hal yang bisa mendukung berhasilnya pelayanan sesuai dengan kebutuhan anak.
3. Memilih Kelas untuk Anak
Setelah diidentifikasi secara tepat kebutuhan anak dan sarana pendukung yang ada, tim kemudian dapat menentukan kelas yang sesuai untuk anak berkebutuhan khusus.
4. Menyiapkan Program Pembelajaran

Materi yang diberikan nantinya harus sesuai dengan kebutuhan anak dan sarana yang ada.

5. Membuat Jadwal Kegiatan
Jadwal kegiatan sehari-hari meliputi: tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, tempat pembelajaran, dan sumber-sumber yang dibutuhkan.
6. Pelatihan Bagi Guru
Setiap guru perlu diberikan pelatihan menyangkut cara menangani anak berkebutuhan khusus dan cara menciptakan kelas yang kondusif. Jadi melalui manajemen pendidikan inklusif, anak akan merasa percaya diri, bangga terhadap diri sendiri serta mampu beradaptasi dengan lingkungan masyarakat umum. Bagi guru, dapat meningkatkan kemampuan mengajar dengan berbagai model sesuai kebutuhan masing-masing anak. Bagi orang tua, merasa bangga karena anaknya memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Dan bagi masyarakat, merasa dihargai karena dilibatkan dalam proses Pendidikan Inklusi

Komponen Input

Manajemen pendidikan inklusif dalam pendidikan luar biasa merupakan suatu proses keseluruhan kegiatan secara bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan dengan mendayagunakan sumber-sumber yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya berupa material demi tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan latar belakang masyarakat lingkungan penyelenggaraan pendidikan inklusif maka penerimaan siswa baru harus memprioritaskan penerimaan didasarkan pada lokasi terdekat pada sekolah, tidak membatasi pada jenis dan derajat kelainan anak. Kurikulum harus disusun secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan anak (ABK) dan

kondisi sekolah, dapat mendorong guru dan tenaga kependidikan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, mendorong pengawas untuk membina secara rutin dan kebebasan untuk berinovasi.

Model pendidikan inklusi pada dasarnya memberikan pelayanan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di sekolah sekolah umum. Dengan menerapkan model pembelajaran Kelas reguler dengan *pull out*. Adapaun model pelayanan pendidikan inklusi diindonesia adalah sebagai berikut : 1) Kelas reguler (inklusi penuh) Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain (normal) sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama, 2) Kelas reguler dengan cluster Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus, 3) Kelas reguler dengan pull out Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus, 4). Kelas reguler dengan cluster dan pull out anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus, 5) Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian anak berkebutuhan khusus belajar dalam kelas pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain (normal) di kelas regular, 6) Kelas khusus penuhan anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah regular.

Kemampuan yang dimiliki guru sekolah inklusi di SMAN 2 Metro antara lain: 1) mampu melakukan modifikasi perilaku, 2) menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan/kelainan penglihatan, 3) menguasai konsep dan

keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan/kelainan pendengaran/komunikasi, 4) Menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan/kelainan intelektual, 5) Menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan/kelainan anggota tubuh dan gerak, 6) Menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan/kelainan perilaku dan social, 7) Menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami kesulitan belajar.

Komponen Proses

Komponen proses penyelenggaraan program pendidikan inklusif di SMAN 2 Metro tidak terlepas dari kurikulum yang dikembangkan sebagai pendukung terlaksananya pendidikan inklusif.

Hierarkinya kurikulum merupakan sebuah program pendidikan yang berisi berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancang serta pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan (Ridjaluddin, 2008 : 115). Menurut S. Nasution (dalam Takdir Ilahi Mohammad, 2013 : 168), kurikulum merupakan salah satu komponen penting pada lembaga pendidikan formal yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan isi pengajaran, mengarahkan proses mekanisme pendidikan, tolok-ukur keberhasilan, dan kualitas hasil pendidikan.

UU RI No 2 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan penagaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan

pendidikan. Kurikulum merupakan sebuah komponen yang dalam penerapannya harus mempertimbangkan segala aspek, yang intinya dalam setiap perubahan kurikulum hendaknya tidak mengabaikan aspek kemajuan dalam mendorong peserta didik agar selalu menciptakan sesuatu yang kreatif dan inovatif bagi pengembang potensinya. Selanjutnya kurikulum yang seharusnya diterapkan di sekolah inklusif menurut Mohammad Takdir Ilahi (2013 : 171) kurikulum pendidikan inklusif menggunakan kurikulum sekolah reguler (kurikulum nasional) yang dimodifikasi (diimprovisasi) sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus, dengan mempertimbangkan karakteristik dan tingkat kecerdasannya.

Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif Nana Syaodih (dalam Takdir Ilahi Mohammad, 2013 : 172) menguraikan tentang komponen-komponen kurikulum yang menentukan masa depan belajar anak berkebutuhan khusus. Beberapa komponen terdiri dari; a) Tujuan, pada pelaksanaan kurikulum atau pengajaran, tujuan memegang peranan penting untuk mengarahkan semua kegiatan pengajaran dan mewarnai komponen-komponen kurikulum lainnya. Tujuan kurikulum yang dimaksudkan untuk perkembangan tuntutan, kondisi, dan kebutuhan masyarakat dan disadari oleh pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan nilai-nilai filosofis; b) materi atau bahan Ajar, untuk mencapai tujuan mengajar yang telah ditentukan, diperlukan bahan ajar. Bahan ajar tersusun oleh topik-topik dan sub topik tertentu yang mengandung ide pokok yang relevan dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki intelegensi diatas normal, materi dalam kurikulum sekolah reguler dapat diperluas dan diperdalam atau ditambah materi baru yang tidak ada didalam kurikulum sekolah reguler, tetapi materidisebut dianggap penting untuk anak berbakat. Sementara itu untuk anak berkebutuhan khusus yang

memiliki intelegensi dibawah normal, materi dalam kurikulum sekolah reguler dapat dikurangi atau diturunkan kesulitan seperlunya atau bahkan dihilangkan bagian tertentu; c) Strategi Pembelajaran, Penyusun bahan ajar berhubungan erat dengan strategi atau metode mengajar; d) Media Pembelajaran, Penggunaan media sebagai perantara dalam proses pembelajaran memiliki nilai dan fungsi yang amat berharga bagi terciptanya iklim pembelajaran yang kondusif. Melalui penggunaan media ini, peserta didik dilatih untuk memperkuat kepekaan dan ketrampilan secara optimal dengan ditopang oleh motivasi guru. Merumuskan nilai urgensi dari media pembelajaran. e) Evaluasi kurikulum, Penilaian kurikulum dimaksudkan untuk melihat atau menaksir keefektifan kurikulum yang digunakan oleh guru dalam mengaplikasikan kurikulum tersebut. Evaluasi kurikulum dapat dijadikan umpan balik apakah tujuan kurikulum sudah tercapai secara maksimal. Hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi adalah perlunya penyesuaian cara, waktu dan isi kurikulum, mengacu kepada hasil asesmen, mempertimbangkan penggunaan Penilaian Acuan Diri, dilaksanakan secara fleksibel, multimetode dan berkelanjutan, secara rutin mengkomunikasikan hasilnya kepada orang tua. (Nana Syaodih dalam Takdir Ilahhi Mohammad, 2013: 172)

Pada umumnya ada beberapa cara yang dapat dipakai dalam kelas umum/pembauran/inklusi untuk mendukung proses pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus seperti: 1) Memberikan guru khusus pada anak sesuai kebutuhannya, misalnya terapis okupasi untuk anak dengan gangguan sensori motorik, atau guru piano untuk anak berbakat music, 2) pembedaan kesalahan dengan segera setelah kesalahan terlihat (diadakanya pembelajaran remedial agar anak paham dan mapu melanjutkan kemateri selanjutnya), 3) mengadaptasi, memodifikasi, atau

memberikan materi/kurikulum khusus, sesuai dengan kemampuan anak, 4) mengajarkan strategi yang efektif dalam pembelajaran, seperti membuat jembatan keledai, membuat pembelajaran untuk menghafal; 5) Penambahan waktu atau mengurangi jumlah soal yang akurat dalam melakukan penilaian seperti dari waktu 1 jam bisa digunakan untuk mengerjakan 10 soal kita kurangi menjadi 5 soal untuk anak ABK.

Komponen Produk

Guru merupakan orang yang berperan penting (significant others) dalam proses pembelajaran tidak dipungkiri bahwa menangani pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus ini membutuhkan tenaga, waktu, atau kreativitas yang lebih banyak dibanding menangani peserta didik normal, Mercer (1983) berpendapat bahwa sebelum mengajar, guru harus; 1) mampu memahami bagaimana sebuah hambatan pada diri peserta didik dapat mempengaruhi hasil belajar, misalnya bagaimana gangguan sensori motorik dapat membuat anak sulit menggambar bentuk tertentu di kelas kesenian. 2) misalnya mengenali hambatan dan mengembangkan pengalaman belajar yang tersendiri untuk anak autis atau disleksia diajari kata benda dengan melemparkan bola yang berisi kata timbul benda atau membuat bentuk dari benda yang dipelajari; 3) Memahami emosi pada peserta didik yang mengalami hambatan seperti sedih atau marah jika tidak dapat mengerjakan tugas di kelas, atau diejek karena kurang menguasai beberapa ketrampilan yang sudah dikuasai teman-temannya. 4) anak yang bersangkutan mengkomunikasikan hambatan peserta didik pada orang tua secara efektif sehingga orang tua dapat menerima kondisi anak dengan baik, tidak cemas atau malah marah berlebihan, dan dapat bekerja sama menangani.

Guru untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan jabatan vital yang dimiliki oleh seorang guru tentunya harus benar-benar dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Penentu keberhasilan pendidikan inklusif tidak lain adalah guru atau tenaga pendidik yang profesional dalam bidangnya masing-masing untuk membina dan mengayomi anak berkebutuhan khusus. Tenaga pendidik atau guru yang mengajar hendaknya memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan, yaitu memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap tentang materi yang akan diajarkan/ dilatihkan, dan memahami karakter siswa (Takdir Ilahi Mohammad, 2013 : 178).

Menurut Dedi Supriadi mengemukakan beberapa hal terkait dengan syarat mutlak bagi seorang guru untuk menjadi profesional; *Pertama* Guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses pembelajarannya dalam hal ini berarti komitmen tertinggi guru adalah kepentingan siswa. *Kedua*, guru menguasai secara mendalam bahan/ mata pelajaran yang diajarkan serta cara mengajarkannya kepada peserta didik, bagi guru hal ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. *Ketiga*, guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi dari cara pengamatan dalam perilaku peserta didik sampai tes hasil belajar. *Keempat*, guru mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya. *Kelima*, guru seyogianya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya (dalam Takdir Ilahi Mohammad, 2013: 181)

Guru yang mempunyai pandangan masa depan akan sangat besar pengaruhnya ketika anak didiknya mendapatkan prestasi belajar yang baik dalam dunia pendidikan. Empat kompetensi harus dimiliki oleh seorang guru, dengan itu guru dapat merancang strategi pembelajaran dengan tepat, metode yang digunakan, media, juga

evaluasi. Guru harus menjadi seorang artis dalam hal ini adalah contoh yang baik bagi siswanya. Maka dari itu, seorang guru hendaknya mempunyai perilaku santun, arif, dan bijaksana.

Dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif SMAN 2 Metro selain menjalin kerjasama kemitraan lintas departemen, sekolah juga harus mampu menjalin kerjasama kemitraan dengan masyarakat, orang tua, para pengusaha, tokoh masyarakat, dan serta stake holders serta berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan pendidikan. Kerjasama kemitraan dapat dilakukan secara individual maupun orang-orang yang tergabung dalam wadah atau organisasi kemasyarakatan, baik organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan non pemerintah, seperti: dewan sekolah, komite sekolah, yayasan-yayasan pendidikan, organisasi-organisasi penyandang cacat, Forum orang tua, dll. Masyarakat (orang tua, anggota keluarga yang lain, atau semua orang yang tinggal di lingkungan sekolah) akan memberikan kontribusi penting terhadap pembelajaran anak berkebutuhan khusus dalam satu lingkungan yang inklusif dan ramah terhadap pembelajaran keterlibatan keluarga, tokoh masyarakat dan anggota masyarakat lainnya sangat penting dalam implementasi pendidikan kebutuhan khusus.

Peran serta masyarakat yang berupa kerjasama kemitraan antara sekolah dengan pemerintah, orang tua, dan kelompok-kelompok masyarakat serta organisasi kemasyarakatan lainnya dilindungi oleh undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah yang mendasari kerjasama kemitraan tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan dari paparan data dan pembahasan yang ada bisa ditarik kesimpulan.

Evaluasi Konteks

Peneliti melihat bahwa pengimplementasian pendidikan inklusif ini merupakan program Departemen Pendidikan Nasional, dimana Tentang Penetapan SD/SMP/SMA Pelaksana Sekolah Inklusif. Adanya Pedoman Khusus dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ini, berdasarkan Penetapan ini, SMA Negeri 2 Metro menjadi salah satu SMA yang terpilih untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif ini. Pengimplementasian Pendidikan Inklusif di Kota Metro ini berdasarkan oleh Peraturan Walikota Metro, nomor 03 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Sesuai dengan Keputusan Walikota Metro, nomor: 416/D3/KPTS/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) penyelenggaraan pendidikan inklusif dan akselerasi kota metro masa bhakti 2012 – 2016 dan Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro : Nomor:213/KPPS/D.3/2011. Dari temuan penelitian dilihat bahwa Belum maksimal kebutuhan proses penyelenggaraan pendidikan inklusif dan Untuk manajemen lingkungan (Hubungan Sekolah dengan Masyarakat), masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membantu mengembangkan pendidikan inklusif.

Evaluasi Input

Peneliti menemukan bahwa evaluasi input merupakan evaluasi Kesesuaian Siswa, Tenaga Pendidik & Kependidikan. Dari data penelitian bisa diambil kesimpulan bahwa Perencanaan pembelajaran masih menggunakan kurikulum yang sesuai dengan sekolah,akan tetapi khusus anak berkebutuhan khusus mereka diturunkan nilai passing gradenya sebagai perencanaan pembelajaran (*khusus*), Sejauh ini pengelolaan pembelajaran dikelas sama dengan yang lainnya, akan tetapi ada kekhususan jika ABK tersebut

tidak lulus ujian, maka akan ada remedial atau ujian yang membantu nilai mereka meningkat sampai mereka bisa mendapatkan passing grade / KKM yang telah disesuaikan dengan kapasitas mereka. Akan tetapi Guru Pendamping Khusus yang berasal dari internal, mereka baru sekali mengikuti Workshop mengenai pendidikan inklusif dan Terlihatnya belum ada Guru Pembimbing Khusus yang memiliki SK dari Pemerintah untuk mendampingi Anak Berkebutuhan Khusus.

Evaluasi Proses

Peneliti menemukan bahwa evaluasi proses merupakan evaluasi berdasarkan kesesuaian proses pembelajaran. Dari data penelitian bisa diambil kesimpulan bahwa proses pembelajaran telah berjalan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif, Metode pembelajaran audio dan visual dimana metode yang dipakai sama dengan siswa umum lainnya, Proses perumusan kurikulum itu dilakukan oleh Guru BK dan Guru Reguler yang telah dipilih untuk menangani Anak Berkebutuhan Khusus di sekolah tersebut, Tidak ada perbedaan antara desain kurikulum sekolah reguler dengan sekolah inklusi, Guru senantiasa melakukan evaluasi kurikulum yang sedang berjalan agar materi yang dikembangkan dan diterapkan selalu sesuai dengan perkembangan, Sumber pembiayaan berasal dari pusat, ada monitoring dari pusat sejak tahun 2010, Kompetensi belajar yg dicapai oleh ABK mengalami peningkatan. Semua mereka lulus ujian dan ada yang diterima di Universitas Negeri Jakarta dan Akademi Keperawatan. Akan tetapi Manajemen lingkungan sekolah (hubungan sekolah dengan masyarakat) belum sesuai dengan pedoman khusus penyelenggaraan inklusif dimana masyarakat masih kurang peduli dan peka terhadap program pendidikan inklusif ini, Sekolah menjalin kerjasama

hanya dengan pihak SLB saja. Sedangkan untuk tenaga dokter / psikolog belum ada jalinan kerjasama dan perlu adanya Guru Pembimbing Khusus.

Evaluasi Produk

Peneliti menemukan bahwa evaluasi produk merupakan evaluasi berdasarkan Kesesuaian Pelayanan, Peran Masyarakat & Orang Tua terhadap produk yang dicapai. Dari data penelitian bisa diambil kesimpulan bahwa Proses pengadaan sarana dan prasarana berjalan

dengan lancar, Ketersediaan sarana dan prasarana bisa dikatakan sudah memadai, Sekolah bekerjasama dengan SLB yang berada dekat dengan sekolah tersebut, bekerjasama dengan pemerintah daerah serta pemerintah pusat. Akan tetapi proses penyelenggaraan belum berjalan dengan maksimal, Masih terlihat kurangnya peran masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif ini dan ada yang terlihat acuh tak acuh terhadap perkembangan anaknya di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, R.C., & Biklen, S.K.B. 1998. *Qualitative Research for Education to Theory and Methods*. Allyn and Bacon, Inc. Boston.
- Burhan & Bungin. 2008. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Direktorat PSLB. 2007. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi*. Jakarta: Dirjendikdasmen.
- Foreman. 2002. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Mercer. 1983. *Qualitative Data Analysis: A Source Book of New Methods*. Beverly Hills. Sage Publication.
- Miles, BM. & Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Rohadi, R.T. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Mohammad, Takdir Ilahi. 2013. *Manajemen Pendidikan Inklusif: Konsep, Kebijakan dan Implementasinya dalam perspektif pendidikan luar biasa*. Makalah tidak diterbitkan. Bandung: Jurusan PLB FIP UPI.
- Moleong, L.J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Ridjaluddin 2008. *Pembelajaran dalam implementasi kurikulum berbasis kompetensi*. Penerbit Prenada Media Group.
- Santrock, Jhon W. 2009. *Support networks for inclusive schooling: Interdependent Integrated Education*. Baltimore: Paul. H. Brookes.